

ABSTRAKSI

Pengadaan tanah merupakan hal terpenting dalam suatu pembangunan nasional, pasalnya setiap pembangunan di negara ini tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan akan lahan tanah di berbagai daerah. Tidak terkecuali dalam hal pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Pembangunan jalan tol Semarang-Batang di satu sisi membawa Provinsi Jawa Tengah pada pembangunan daerah di berbagai sektor yang sangat menjanjikan, namun di satu sisi pembangunan tersebut telah memarginalkan kepentingan ekonomi dan sosial-budaya dari masyarakat terdampak yang tinggal di sekitar kawasan yang akan dibangun jalan tol tersebut. Oleh sebab itulah skripsi ini mencoba membahas persoalan terkait pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Semarang-Batang saat ini dan persoalan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Adapun pembahasan berbagai permasalahan tersebut ditujukan agar setiap pembaca skripsi ini mampu memahami hasil analisa dan deskripsi dari penelitian skripsi ini terkait persoalan terkait pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Semarang-Batang saat ini dan persoalan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Oleh karena persoalan skripsi ini tidak sebatas hanya pembahasan normatif hukum semata maka jenis penelitian dalam skripsi ini ialah yuridis sosiologis. Kemudian berdasarkan temuan dari penelitian ini dapat terlihat bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dan ganti kerugian pada pembangunan jalan tol Semarang-Batang belum lah berkeadilan, hal ini ditunjukkan dengan lamanya pelunasan biaya ganti kerugian masyarakat serta tidak sesuainya ganti kerugian tanah dengan kenaikan harga tanah akibat lamanya pelunasan ganti kerugian kepada masyarakat, serta hilangnya fungsi ekonomis dalam waktu lama dari tanah yang dinyatakan terkena rencana pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Berbagai persoalan ini diakibatkan adanya persoalan ketidak tegasan dalam Peraturan Presiden Nomer 2 Tahun 2012 Tengan Pengadaan Tanah.

Kata Kunci: Pelaksanaan Hukum, Pengadaan Tanah dan Ganti Kerugian, Pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang.